



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana . . .

- Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

Pasal I . . .

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 10);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 10);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Gubernur;
 - b. wakil Gubernur;
 - c. pejabat pimpinan tinggi madya;
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - e. pejabat administrator dan pejabat pengawas;
 - f. pejabat fungsional auditor;
 - g. pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di Daerah;
 - h. pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu pengelola pengadaan barang/jasa;
 - i. bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan;
 - j. bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu;
 - k. pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu yang menangani perizinan.
 - l. tim ahli Gubernur dan wakil Gubernur;
 - m. sekretaris pribadi Gubernur dan wakil Gubernur; dan
 - n. ajudan Gubernur dan wakil Gubernur.
- (3) Daftar Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal II . . .

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Acara Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 29 Desember 2025
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 29 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

JUNDA MAULANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,



SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 42

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR 42 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
 SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 SULAWESI BARAT.

DAFTAR PENYELENGGARA NEGARA WAJIB LHKPN

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
1	Pimpinan Tertinggi	Kepala Daerah	Gubernur
2	Wakil Pimpinan	Wakil Kepala Daerah	Wakil Gubernur
3	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Badan
4	Badan Kepegawaian Daerah	Sekretariat	Sekretaris
5	Badan Kepegawaian Daerah	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan	Kepala Bidang
6	Badan Kepegawaian Daerah	Bidang Pengembangan Asn	Kepala Bidang
7	Badan Kepegawaian Daerah	Bidang Pengadaan Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian	Kepala Bidang
8	Badan Kepegawaian Daerah	Bidang Mutasi Kependidikan Dan Promosi Asn	Kepala Bidang
9	Badan Kepegawaian Daerah	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
10	Badan Kepegawaian Daerah	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset
11	Badan Kepegawaian Daerah	Sekretariat	Bendahara
12	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kepala Badan
13	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretariat	Sekretaris
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Bidang Politik Daerah	Kepala Bidang
15	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Bidang Kewaspadaan Nasional	Kepala Bidang
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Bidang Ketahanan Seni, Sosial Budaya, Ekonomi, Agama Dan Kemasyarakatan	Kepala Bidang
17	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Kepala Bidang
18	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
19	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretariat	Bendahara
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretariat	Sekretaris
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	Kepala Bidang
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Kepala Bidang
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Kedaruratan Dan Logistik	Kepala Bidang

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretariat	Bendahara
27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Kepala Badan
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Sekretariat	Sekretaris
29	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Bidang Perencanaan Pendapatan Dan Teknologi Informasi	Kepala Bidang
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Bidang Pendapatan Daerah	Kepala Bidang
31	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Bidang Penatausahaan Dan Kas Daerah	Kepala Bidang
32	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Bidang Barang Milik Daerah	Kepala Bidang
33	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Bidang Anggaran Dan Bina Kabupaten	Kepala Bidang
34	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kepala Bidang
35	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
36	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Sekretariat	Bendahara
37	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Sekretariat	Bendahara Pengeluaran
38	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Polewali Mandar	Kepala Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
39	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Polewali Mandar	Kepala Seksi Pembayaran Dan Penagihan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
40	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Polewali Mandar	Kepala Seksi Pendataan Dan Penetapan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
41	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Polewali Mandar	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
42	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Pasangkayu	Kepala Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
43	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Pasangkayu	Kepala Seksi Pembayaran Dan Penagihan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
44	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Pasangkayu	Kepala Seksi Pendataan Dan Penetapan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
45	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Pasangkayu	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
46	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Mamuju	Kepala Seksi Pendataan Dan Penetapan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
47	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Mamuju	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
48	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Mamuju	Kepala Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
49	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Mamuju	Kepala Seksi Pembayaran Dan Penagihan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
50	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Mamasa	Kepala Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
51	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Mamasa	Kepala Seksi Pembayaran Dan Penagihan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
52	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Mamasa	Kepala Seksi Pendataan Dan Penetapan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
53	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Mamasa	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
54	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Majene	Kepala Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
55	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Majene	Kepala Seksi Pendataan Dan Penetapan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
56	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Majene	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
57	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Majene	Kepala Seksi Pembayaran Dan Penagihan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
58	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Bidang Perencanaan Pendapatan Dan Teknologi Informasi	Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi Pendapatan Dan Keuangan
59	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Bidang Perencanaan Pendapatan Dan Teknologi Informasi	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan
60	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Bidang Pendapatan Daerah	Kepala Sub Bidang Pendapatan Retribusi Daerah
61	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Bidang Pendapatan Daerah	Kepala Sub Bidang Pajak Daerah
62	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Bidang Penatausahaan Dan Kas Daerah	Kepala Sub Bidang Kas Daerah
63	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Bidang Penatausahaan Dan Kas Daerah	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Operasi
64	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Bidang Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran
65	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Bidang Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindatanganan Dan Penghapusan
66	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Bidang Anggaran Dan Bina Kabupaten	Kepala Sub Bidang Bina Kabupaten
67	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Bidang Anggaran Dan Bina Kabupaten	Kepala Sub Bidang Penganggaran Pendapatan Dan Belanja Belanja Operasi
68	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang Akuntansi Keuangan Dan Tuntutan Ganti Rugi
69	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang Akuntansi Barang Milik Daerah
70	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Mamuju Tengah	Kepala Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
71	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Mamuju Tengah	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
72	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Mamuju Tengah	Kepala Seksi Pembayaran Dan Penagihan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
73	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	UPTD Samsat Kabupaten Mamuju Tengah	Kepala Seksi Pendataan Dan Penetapan UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
74	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan
75	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretariat	Sekretaris
76	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional	Kepala Bidang
77	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Pengelolaan Kelembagaan	Kepala Bidang
78	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Kepala Bidang
79	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
80	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan
81	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretariat	Bendahara
82	Badan Penghubung	Badan Penghubung	Kepala Badan
83	Badan Penghubung	Sekretariat	Kepala Sub Bidang Tata Usaha Dan Keuangan
84	Badan Penghubung	Sekretariat	Kepala Sub Bidang Promosi, Data Dan Informasi Daerah
85	Badan Penghubung	Sekretariat	Kepala Sub Bidang Sarana Dan Pelayanan
86	Badan Penghubung	Sekretariat	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
87	Badan Penghubung	Sekretariat	Bendahara
88	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan
89	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	Sekretariat	Sekretaris
90	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang
91	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Kepala Bidang
92	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Kepala Bidang
93	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Kepala Bidang
94	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
95	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
96	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	Sekretariat	Bendahara
97	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Kepala Dinas
98	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Sekretariat	Sekretaris
99	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Bidang Ketenagalistrikan	Kepala Bidang
100	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Bidang Energi	Kepala Bidang
101	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Bidang Geologi Dan Air Tanah	Kepala Bidang
102	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Bidang Minerba	Kepala Bidang
103	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
104	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset
105	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Sekretariat	Bendahara
106	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	UPTD Laboratorium	Kepala UPTD Laboratorium
107	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	UPTD Laboratorium	Kasi Jasa Laboratorium Dan Data / Informasi Geografis
108	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	UPTD Laboratorium	Kasi Peralatan Pemboran, Eksplorasi Dan Produksi
109	Dinas Kehutanan	Dinas Kehutanan	Kepala Dinas
110	Dinas Kehutanan	Sekretariat	Sekretaris
111	Dinas Kehutanan	Bidang Tata Guna Dan Pemanfaatan Hutan	Kepala Bidang
112	Dinas Kehutanan	Bidang Perlindungan Hutan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem (KSDAE)	Kepala Bidang
113	Dinas Kehutanan	Bidang Pengelolaan Das Dan Perhutanan Sosial	Kepala Bidang
114	Dinas Kehutanan	Sekretariat	Bendahara
115	Dinas Kehutanan	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
116	Dinas Kehutanan	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
117	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Sarudu	Kepala UPTD
118	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Sarudu	Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan
119	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Sarudu	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
120	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Sarudu	Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Perberdayaan Masyarakat

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
121	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasangkayu	Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Perberdayaan Masyarakat
122	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasangkayu	Kepala UPTD
123	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasangkayu	Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan
124	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasangkayu	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
125	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli	Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Perberdayaan Masyarakat
126	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli	Kepala UPTD
127	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli	Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan
128	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli	Kepala Subbagian Tata Usaha
129	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Timur	Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Perberdayaan Masyarakat
130	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Timur	Kepala UPTD
131	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Timur	Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan
132	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Timur	Kepala Subbagian Tata Usaha
133	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah	Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Perberdayaan Masyarakat
134	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah	Kepala UPTD
135	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah	Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan
136	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah	Kepala Subbagian Tata Usaha
137	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Barat	Kepala UPTD
138	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Barat	Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Pemerdayaan Masyarakat
139	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Barat	Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan
140	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Barat	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
141	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda	Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Perberdayaan Masyarakat
142	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda	Kepala UPTD
143	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda	Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan
144	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda	Kepala Subbagian Tata Usaha
145	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lariang	Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Perberdayaan Masyarakat
146	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lariang	Kepala UPTD
147	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lariang	Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan
148	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lariang	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
149	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karossa	Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Perberdayaan Masyarakat
150	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karossa	Kepala UPTD
151	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karossa	Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan
152	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karossa	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
153	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karama	Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Perberdayaan Masyarakat
154	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karama	Kepala UPTD
155	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karama	Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan
156	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karama	Kepala Subbagian Tata Usaha
157	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Budong-Budong	Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Perberdayaan Masyarakat
158	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Budong-Budong	Kepala UPTD
159	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Budong-Budong	Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan
160	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Budong-Budong	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
161	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bonehau Kalumpang	Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Perberdayaan Masyarakat
162	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bonehau Kalumpang	Kepala UPTD
163	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bonehau Kalumpang	Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan
164	Dinas Kehutanan	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bonehau Kalumpang	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
165	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Kepala Dinas
166	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Sekretariat	Sekretaris
167	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Bidang Perikanan Tangkap Dan Tata Ruang Kelautan	Kepala Bidang
168	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Bidang Perikanan Budidaya	Kepala Bidang
169	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan	Kepala Bidang
170	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Bidang Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Kepala Bidang
171	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
172	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset
173	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Sekretariat	Bendahara
174	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Sekretariat	Bendahara Pengeluaran
175	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Sekretariat	Bendahara APBN
176	Dinas Kelautan Dan Perikanan	UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi	Kepala Unit
177	Dinas Kelautan Dan Perikanan	UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
178	Dinas Kelautan Dan Perikanan	UPT Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang	Kepala Unit
179	Dinas Kelautan Dan Perikanan	UPT Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang	Kepala Seksi Produksi, Peningkatan Mutu Dan Standarisasi
180	Dinas Kelautan Dan Perikanan	UPT Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang	Kepala Seksi Informasi Dan Pemasaran Benih
181	Dinas Kelautan Dan Perikanan	UPT Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
182	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Kepala Dinas
183	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Sekretariat	Sekretaris
184	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Kepala Bidang
185	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Bidang Pembudayaan Olahraga	Kepala Bidang
186	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Bidang Layanan Kepemudaan	Kepala Bidang

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
187	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
188	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Sekretariat	Bendahara
189	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	UPTD Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)	Kepala UPTD PPAP & PSPO
190	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	UPTD Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPAP & PSPO
191	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	UPTD Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)	Kasi.Pendidikan Dan Pelatihan UPTD PPAP & PSPO
192	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	UPT Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)	Kasi. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana UPTD PPAP & PSPO
193	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	UPT Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)	Bendahara APBN
194	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas
195	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Sekretariat	Sekretaris
196	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data	Kepala Bidang
197	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kepala Bidang
198	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil	Kepala Bidang
199	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
200	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Sekretariat	Bendahara
201	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas
202	Dinas Kesehatan	Sekretariat	Sekretaris
203	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang
204	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Kepala Bidang
205	Dinas Kesehatan	Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan	Kepala Bidang
206	Dinas Kesehatan	UPTD Laboratorium Kesehatan Dan Transfusi Darah	Kepala UPTD
207	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kepala Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat
208	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat
209	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa
210	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Kepala Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
211	Dinas Kesehatan	Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan
212	Dinas Kesehatan	Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan	Kepala Seksi Kefarmasian Dan Alkes
213	Dinas Kesehatan	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
214	Dinas Kesehatan	UPTD Laboratorium Kesehatan Dan Transfusi Darah	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
215	Dinas Kesehatan	UPTD Laboratorium Kesehatan Dan Transfusi Darah	Kepala Seksi Pemantapan Mutu Dan Bimbingan Teknis
216	Dinas Kesehatan	UPTD Laboratorium Kesehatan Dan Transfusi Darah	Kepala Seksi Pelayanan
217	Dinas Kesehatan	Sekretariat	Bendahara
218	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Kepala Dinas
219	Dinas Ketahanan Pangan	Sekretariat	Sekretaris
220	Dinas Ketahanan Pangan	Bidang Penganekaragaman, Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Kepala Bidang
221	Dinas Ketahanan Pangan	Bidang Ketersediaan, Sumber Daya Dan Kerawanan Pangan	Kepala Bidang
222	Dinas Ketahanan Pangan	Bidang Distribusi, Cadangan Dan Harga Pangan	Kepala Bidang
223	Dinas Ketahanan Pangan	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
224	Dinas Ketahanan Pangan	Sekretariat	Bendahara
225	Dinas Ketahanan Pangan	UPT Balai Sertifikasi Dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT)	Kepala Unit
226	Dinas Ketahanan Pangan	UPT Balai Sertifikasi Dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT)	Kepala Seksi Manajer Mutu
227	Dinas Ketahanan Pangan	UPT Balai Sertifikasi Dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT)	Kepala Seksi Manajer Teknis
228	Dinas Ketahanan Pangan	UPT Balai Sertifikasi Dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
229	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Kepala Dinas
230	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Sekretariat	Sekretaris
231	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Kepala Dinas
232	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Bidang Aplikasi Dan Informatika	Kepala Bidang
233	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Bidang Statistik	Kepala Bidang
234	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Bidang Persandian	Kepala Bidang

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
235	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik	Kepala Bidang
236	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
237	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Sekretariat	Bendahara Barang Milik Daerah
238	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas
239	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat	Sekretaris
240	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kepala Bidang
241	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas	Kepala Bidang
242	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Penataan Dan Penataan PPLH	Kepala Bidang
243	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
244	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat	Bendahara
245	Dinas Lingkungan Hidup	UPT Laboratorium Lingkungan	Kepala Unit
246	Dinas Lingkungan Hidup	UPT Laboratorium Lingkungan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
247	Dinas Lingkungan Hidup	UPT Laboratorium Lingkungan	Kasi Pengujian UPTD Laboratorium
248	Dinas Lingkungan Hidup	UPT Laboratorium Lingkungan	Kasi Pengendali Mutu UPTD Laboratorium
249	Dinas Lingkungan Hidup	UPT Laboratorium Pengelola Limbah B3 Lingkungan	Kepala Unit
250	Dinas Lingkungan Hidup	UPT Laboratorium Pengelola Limbah B3 Lingkungan	Kasi Penjamin Pengelola LB3 UPTD Pengelola L83
251	Dinas Lingkungan Hidup	UPT Laboratorium Pengelola Limbah B3 Lingkungan	Kasi Pengelola LB3 UPTD Pengelola L83
252	Dinas Lingkungan Hidup	UPT Laboratorium Pengelola Limbah B3 Lingkungan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
253	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	Kepala Dinas
254	Dinas Pariwisata	Sekretariat	Sekretaris
255	Dinas Pariwisata	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Pengendalian Industri Pariwisata	Kepala Bidang
256	Dinas Pariwisata	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kepala Bidang
257	Dinas Pariwisata	Bidang Pemasaran Pariwisata	Kepala Bidang
258	Dinas Pariwisata	Bidang Kelembagaan Dan Kemitraan Pariwisata	Kepala Bidang
259	Dinas Pariwisata	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
260	Dinas Pariwisata	Sekretariat	Bendahara
261	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Kepala Dinas
262	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sekretariat	Sekretaris

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
263	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Bidang Tata Ruang	Kepala Bidang
264	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Bidang Cipta Pengelolaan Sumber Daya Air	Kepala Bidang
265	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Bidang Cipta Karya	Kepala Bidang
266	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Bidang Bina Marga	Kepala Bidang
267	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Kepala Bidang
268	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
269	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	UPT Wilayah Sungai	Kepala Seksi Operasional Pelaksanaan Dan Pemeliharaan
270	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	UPT Wilayah Sungai	Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengawasan Teknis
271	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	UPT Wilayah Sungai	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
272	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	UPT Wilayah Sungai	Kepala Unit
273	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	UPT Pengujian Dan Standarisasi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
274	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	UPT Pengujian Dan Standarisasi	Kepala Seksi Standarisasi
275	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	UPT Pengujian Dan Standarisasi	Kepala Seksi Pengujian
276	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	UPT Pengujian Dan Standarisasi	Kepala Unit
277	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	UPT Jalan Dan Jembatan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
278	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	UPT Jalan Dan Jembatan	Kepala Seksi Peralatan Dan Bahan Jalan
279	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	UPT Jalan Dan Jembatan	Kepala Seksi Jalan Dan Jembatan
280	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	UPT Jalan Dan Jembatan	Kepala Unit
281	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sekretariat	Bendahara Pengeluaran
282	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sekretariat	Bendahara Penerimaan
283	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Bidang Tata Ruang	Kepala Seksi Pengendalian Dan Pengawasan
284	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Bidang Tata Ruang	Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang
285	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Bidang Cipta Pengelolaan Sumber Daya Air	Kepala Seksi Sungai, Pantai Dan Waduk
286	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Bidang Cipta Pengelolaan Sumber Daya Air	Kepala Seksi Irigasi Dan Rawa
287	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Bidang Cipta Pengelolaan Sumber Daya Air	Bendahara
288	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Bidang Cipta Karya	Kepala Seksi Penataan Bangunan Dan Lingkungan

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
289	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Bidang Cipta Karya	Kepala Seksi Air Minum
290	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Bidang Cipta Karya	Bendahara
291	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Bidang Bina Marga	Kepala Seksi Pembangunan Jembatan
292	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Bidang Bina Marga	Kepala Seksi Pembangunan Jalan
293	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Bidang Bina Marga	Bendahara
294	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Kepala Seksi Kerja Sama, Pemberdayaan Dan Pengembangan Sdm
295	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Kepala Seksi Pengaturan Dan Pengawasan Jasa Konstruksi
296	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kepala Dinas
297	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Sekretariat	Sekretaris
298	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kepala Bidang
299	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna	Kepala Bidang
300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Bidang Pemerintahan Desa	Kepala Bidang
301	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Bidang Pelayanan Sosial Dasar Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa	Kepala Bidang
302	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
303	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset
304	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Sekretariat	Bendahara
305	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas
306	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	Sekretaris
307	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak	Kepala Bidang

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
308	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Kepala Bidang
309	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kepala Bidang
310	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga, Data Dan Informasi	Kepala Bidang
311	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
312	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	Kepala Sub Bagian Tindak Lanjut
313	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	Kepala Sub Bagian Pengaduan
314	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	Kepala Unit
315	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
316	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	Bendahara
317	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas
318	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat	Sekretaris
319	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
320	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat	Bendahara

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
321	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Kepala Dinas
322	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Sekretariat	Sekretaris
323	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Bidang Sekolah Menengah Kejuruan	Kepala Bidang
324	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Bidang Sekolah Menengah Atas	Kepala Bidang
325	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Bidang Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan Paud Dan Pendidikan Dasar	Kepala Bidang
326	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Bidang Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Kepala Bidang
327	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Bidang Kebudayaan	Kepala Bidang
328	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	UPT Taman Budaya Dan Museum	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Seni Budaya
329	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	UPT Taman Budaya Dan Museum	Kepala Seksi Pelestarian Seni Budaya Dan Permuseuman
330	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	UPT Taman Budaya Dan Museum	Kepala Unit
331	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	UPT Taman Budaya Dan Museum	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
332	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	UPT Balai Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan (BPTIKPK)	Kepala Seksi Pemanfaatan
333	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	UPT Balai Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan (BPTIKPK)	Kepala Seksi Evaluasi
334	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	UPT Balai Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan (BPTIKPK)	Kepala Unit
335	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	UPT Balai Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan (BPTIKPK)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
336	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri Topoyo	Kepala Sekolah
337	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri Tapango	Kepala Sekolah
338	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri Sulbar	Kepala Sekolah
339	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri Rea Timur / SPPN Polman	Kepala Sekolah
340	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri Pariwisata Mamasa	Kepala Sekolah
341	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri Papalang	Kepala Sekolah
342	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri Paku	Kepala Sekolah
343	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri Luyo	Kepala Sekolah

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
344	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri Limboro	Kepala Sekolah
345	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri Lambanan	Kepala Sekolah
346	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri Labuang	Kepala Sekolah
347	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri Karossa	Kepala Sekolah
348	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri Kalumpang	Kepala Sekolah
349	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri Campalagian	Kepala Sekolah
350	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri Bulu	Kepala Sekolah
351	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri Balanipa	Kepala Sekolah
352	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri Alu	Kepala Sekolah
353	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 9 Majene	Kepala Sekolah
354	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 8 Majene	Kepala Sekolah
355	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 7 Majene	Kepala Sekolah
356	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 6 Majene	Kepala Sekolah
357	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 5 Majene	Kepala Sekolah
358	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 4 Majene	Kepala Sekolah
359	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 3 Majene	Kepala Sekolah
360	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 2 Polewali	Kepala Sekolah
361	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 2 Pasangkayu	Kepala Sekolah
362	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 2 Majene	Kepala Sekolah
363	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 2 Baras	Kepala Sekolah
364	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Tutar	Kepala Sekolah
365	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Tommo	Kepala Sekolah
366	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Tobadak	Kepala Sekolah
367	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Tinambung	Kepala Sekolah
368	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Tikke	Kepala Sekolah
369	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Tapalang Barat	Kepala Sekolah
370	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Tapalang	Kepala Sekolah
371	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Tanduk Kalua	Kepala Sekolah

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
372	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Tabulahan	Kepala Sekolah
373	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Sumarorong	Kepala Sekolah
374	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Sesenapadang	Kepala Sekolah
375	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Sarudu	Kepala Sekolah
376	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Sarjo	Kepala Sekolah
377	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Rantebulahan Timur	Kepala Sekolah
378	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Rangas	Kepala Sekolah
379	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Polewali	Kepala Sekolah
380	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Pasangkayu	Kepala Sekolah
381	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Pana	Kepala Sekolah
382	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Messawa	Kepala Sekolah
383	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Mehalaan	Kepala Sekolah
384	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Mamuju	Kepala Sekolah
385	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Mamasa	Kepala Sekolah
386	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Majene	Kepala Sekolah
387	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Lariang	Kepala Sekolah
388	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Dapurang	Kepala Sekolah
389	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Buntu Malangka	Kepala Sekolah
390	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Budong Budong	Kepala Sekolah
391	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Bonehau	Kepala Sekolah
392	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Baras	Kepala Sekolah
393	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Bambang	Kepala Sekolah
394	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Bambalamutu	Kepala Sekolah
395	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Aralle	Kepala Sekolah
396	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri Matakali	Kepala Sekolah
397	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri Masewe	Kepala Sekolah
398	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 4 Polewali	Kepala Sekolah
399	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 3 Polewali	Kepala Sekolah

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
400	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 3 Mamuju	Kepala Sekolah
401	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 3 Majene	Kepala Sekolah
402	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 3 Kalukku	Kepala Sekolah
403	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 3 Budong-Budong	Kepala Sekolah
404	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 3 Bambang	Kepala Sekolah
405	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 2 Topoyo	Kepala Sekolah
406	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 2 Tommo	Kepala Sekolah
407	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 2 Tobadak	Kepala Sekolah
408	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 2 Tapalang	Kepala Sekolah
409	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 2 Polewali	Kepala Sekolah
410	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 2 Pasangkayu	Kepala Sekolah
411	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 2 Mamuju	Kepala Sekolah
412	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 2 Majene	Kepala Sekolah
413	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 2 Karossa	Kepala Sekolah
414	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 2 Kalukku	Kepala Sekolah
415	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 2 Campalagian	Kepala Sekolah
416	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 2 Buntu Malangka	Kepala Sekolah
417	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 2 Budong-Budong	Kepala Sekolah
418	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 2 Bonehau	Kepala Sekolah
419	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 2 Bambang	Kepala Sekolah
420	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Wonomulyo	Kepala Sekolah
421	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Tubbi Taramanu	Kepala Sekolah
422	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Topoyo	Kepala Sekolah
423	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Tommo	Kepala Sekolah
424	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Tobadak	Kepala Sekolah
425	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Tinambung	Kepala Sekolah
426	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Tikke Raya	Kepala Sekolah
427	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Tapango	Kepala Sekolah

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
428	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Tapalang Barat	Kepala Sekolah
429	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Tapalang	Kepala Sekolah
430	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Tammerodo	Kepala Sekolah
431	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Tabulahan	Kepala Sekolah
432	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Sumarorong	Kepala Sekolah
433	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Simboro	Kepala Sekolah
434	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Sesena Padang	Kepala Sekolah
435	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Sendana	Kepala Sekolah
436	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Sarudu	Kepala Sekolah
437	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Sarjo	Kepala Sekolah
438	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Sampaga	Kepala Sekolah
439	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Rantebulahan Timur	Kepala Sekolah
440	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Polewali	Kepala Sekolah
441	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Pasangkayu	Kepala Sekolah
442	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Papalang	Kepala Sekolah
443	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Pangale	Kepala Sekolah
444	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Pana	Kepala Sekolah
445	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Pamboang	Kepala Sekolah
446	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Nosu	Kepala Sekolah
447	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Messawa	Kepala Sekolah
448	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Mehalaan	Kepala Sekolah
449	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Matangnga	Kepala Sekolah
450	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Mamuju	Kepala Sekolah
451	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Mambi	Kepala Sekolah
452	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Mamasa	Kepala Sekolah
453	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Malunda	Kepala Sekolah
454	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Majene	Kepala Sekolah
455	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Lariang	Kepala Sekolah

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
456	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Karossa	Kepala Sekolah
457	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Kalumpang	Kepala Sekolah
458	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Kalukku	Kepala Sekolah
459	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Duripoku	Kepala Sekolah
460	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Dapurang	Kepala Sekolah
461	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Campalagian	Kepala Sekolah
462	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Buntumalangka	Kepala Sekolah
463	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Bulutaba	Kepala Sekolah
464	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Budong-Budong	Kepala Sekolah
465	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Bonehau	Kepala Sekolah
466	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Baras	Kepala Sekolah
467	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Bambang	Kepala Sekolah
468	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Bambalamutu	Kepala Sekolah
469	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Bambaira	Kepala Sekolah
470	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Balla	Kepala Sekolah
471	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Aralle	Kepala Sekolah
472	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Alu	Kepala Sekolah
473	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SLB Negeri Wonomulyo	Kepala Sekolah
474	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SLB Negeri Tobadak	Kepala Sekolah
475	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SLB Negeri Polewali	Kepala Sekolah
476	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat	Kepala Sekolah
477	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SLB Negeri Pasangkayu	Kepala Sekolah
478	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SLB Negeri Pamboang	Kepala Sekolah
479	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SLB Negeri Mapilli	Kepala Sekolah
480	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SLB Negeri Mamasa	Kepala Sekolah
481	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SLB Negeri Malunda	Kepala Sekolah
482	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SLB Negeri Lutang	Kepala Sekolah
483	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SLB Negeri Campalagian	Kepala Sekolah

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
484	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SLB Negeri Bonde-Bonde	Kepala Sekolah
485	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SLB Negeri Baitang	Kepala Sekolah
486	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
487	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset
488	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Sekretariat	Bendahara
489	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Wilayah III	Kepala Cabang
490	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Wilayah II	Kepala Cabang
491	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Wilayah I	Kepala Cabang
492	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Kepala Seksi Pembinaan SMK Cab. Dinas Wilayah II
493	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Wilayah II
494	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Kepala Seksi Pembinaan SMK Cab. Dinas Wilayah I
495	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Kepala Seksi Pembinaan SMA Dan SLB Cab. Dinas Wilayah I
496	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Wilayah I
497	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Kepala Seksi Pembinaan SMA Dan SLB Cab. Dinas Wilayah II
498	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Wilayah III
499	Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan	Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan	Kepala Dinas
500	Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan	Sekretariat	Sekretaris
501	Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan	Bidang Perindustrian	Kepala Bidang
502	Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan	Bidang Perdagangan	Kepala Bidang
503	Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan	Bidang Koperasi Dan UKM	Kepala Bidang
504	Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan	UPT Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)	Kepala Unit
505	Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan	UPT Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
506	Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan	UPT Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)	Kepala Seksi Jaminan Mutu
507	Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan	UPT Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)	Kepala Seksi Pengujian UPTD (BPSMB)
508	Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
509	Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan	Sekretariat	Bendahara
510	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas
511	Dinas Perhubungan	Sekretariat	Sekretaris
512	Dinas Perhubungan	Bidang Pengembangan Transportasi Kebandarudaraan Dan Perkeretaapian	Kepala Bidang
513	Dinas Perhubungan	Bidang Pelayaran	Kepala Bidang
514	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Kepala Bidang
515	Dinas Perhubungan	UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III (Mateng-Pasangkayu)	Kepala Seksi Angkutan Jalan Dan Terminal
516	Dinas Perhubungan	UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III (Mateng-Pasangkayu)	Kepala Unit
517	Dinas Perhubungan	UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III (Mateng-Pasangkayu)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
518	Dinas Perhubungan	UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III (Mateng-Pasangkayu)	Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Dan ASDP
519	Dinas Perhubungan	UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II (Majene-Mamuju)	Kepala Seksi Angkutan Jalan Dan Terminal
520	Dinas Perhubungan	UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II (Majene-Mamuju)	Kepala Unit
521	Dinas Perhubungan	UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II (Majene-Mamuju)	Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Dan ASDP
522	Dinas Perhubungan	UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II (Majene-Mamuju)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
523	Dinas Perhubungan	UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I (Mamasa-Polewali)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
524	Dinas Perhubungan	UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I (Mamasa-Polewali)	Kepala Seksi Angkutan Jalan Dan Terminal
525	Dinas Perhubungan	UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I (Mamasa-Polewali)	Kepala Unit
526	Dinas Perhubungan	UPT Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I (Mamasa-Polewali)	Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Dan ASDP

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
527	Dinas Perhubungan	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
528	Dinas Perhubungan	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan
529	Dinas Perhubungan	Sekretariat	Bendahara
530	Dinas Perhubungan	Bidang Pengembangan Transportasi Kebandarudaraan Dan Perkeretaapian	Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan Dan Kebandarudaraan
531	Dinas Perhubungan	Bidang Pengembangan Transportasi Kebandarudaraan Dan Perkeretaapian	Kepala Seksi Perkeretaapian
532	Dinas Perhubungan	Bidang Pelayaran	Kepala Seksi Kepelabuhanan
533	Dinas Perhubungan	Bidang Pelayaran	Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat Dan ASDP
534	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Kepala Seksi Angkutan
535	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Kepala Seksi Terminal
536	Dinas Perkebunan Daerah	Dinas Perkebunan Daerah	Kepala Dinas
537	Dinas Perkebunan Daerah	Sekretariat	Sekretaris
538	Dinas Perkebunan Daerah	Bidang Prasarana, Sarana Dan Kelembagaan	Kepala Bidang
539	Dinas Perkebunan Daerah	Bidang Perlindungan Perkebunan	Kepala Bidang
540	Dinas Perkebunan Daerah	Bidang Perbenihan Dan Produksi	Kepala Bidang
541	Dinas Perkebunan Daerah	Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil	Kepala Bidang
542	Dinas Perkebunan Daerah	UPTD BPPTP	Kepala Seksi Perbenihan
543	Dinas Perkebunan Daerah	UPTD BPPTP	Kepala Unit
544	Dinas Perkebunan Daerah	UPTD BPPTP	Kepala Subbagian Tata Usaha
545	Dinas Perkebunan Daerah	UPTD BPPTP	Kepala Seksi Proteksi
546	Dinas Perkebunan Daerah	UPTD BP2MBP	Kepala Seksi Sertifikasi Dan Pengujian Mutu
547	Dinas Perkebunan Daerah	UPTD BP2MBP	Kepala Seksi Pengawasan Mutu Benih
548	Dinas Perkebunan Daerah	UPTD BP2MBP	Kepala Unit
549	Dinas Perkebunan Daerah	UPTD BP2MBP	Kepala Subbagian Tata Usaha
550	Dinas Perkebunan Daerah	Sekretariat	Bendahara
551	Dinas Perkebunan Daerah	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
552	Dinas Perkebunan Daerah	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset
553	Dinas Perkebunan Daerah	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Program Dan Pelaporan
554	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Kepala Dinas
555	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Sekretariat	Sekretaris
556	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Bidang Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Kepala Bidang

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
557	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan Dan Pelestarian	Kepala Bidang
558	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan	Kepala Bidang
559	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Bidang Pengelolaan Dan Layanan Arsip	Kepala Bidang
560	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
561	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Sekretariat	Bendahara
562	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Kepala Dinas
563	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Sekretariat	Sekretaris
564	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan	Kepala Bidang
565	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Bidang Permukiman	Kepala Bidang
566	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Bidang Pertanahan	Kepala Bidang
567	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Sekretariat	Bendahara
568	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
569	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan
570	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Kepala Dinas
571	Dinas Sosial	Sekretariat	Sekretaris
572	Dinas Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kepala Bidang
573	Dinas Sosial	Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Kepala Bidang
574	Dinas Sosial	Bidang Penanganan Fakir Miskin	Kepala Bidang
575	Dinas Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kepala Bidang
576	Dinas Sosial	UPTD Karya Wanita	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial
577	Dinas Sosial	UPTD Karya Wanita	Kepala Seksi Program Dan Advokasi Sosial
578	Dinas Sosial	UPTD Karya Wanita	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
579	Dinas Sosial	UPTD Karya Wanita	Kepala UPTD
580	Dinas Sosial	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Keuangan
581	Dinas Sosial	Sekretariat	Bendahara
582	Dinas Sosial	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
583	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	Kepala Dinas
584	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	Sekretariat	Sekretaris
585	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	Bidang Hortikultura	Kepala Bidang

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
586	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	Bidang Pangan	Kepala Bidang
587	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	Bidang Penyuluhan, Prasarana Dan Sarana Pertanian	Kepala Bidang
588	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Kepala Bidang
589	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
590	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	Sekretariat	Bendahara Pengeluaran
591	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	Sekretariat	Bendahara APBN
592	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	Sekretariat	Bendahara Penerimaan
593	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	UPT Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Holtikultura (BPSBTPH)	Kepala UPTD BPSBTPH
594	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	UPT Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Holtikultura (BPSBTPH)	Kepala Subbagian Tata Usaha
595	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	UPT Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Kepala Seksi Sertifikasi Dan Pengujian Laboratorium
596	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	UPT Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Kepala Seksi Pelayanan Penilaian Kultivar Dan Pengawasan Benih
597	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	UPT Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak Dan Inseminasi Buatan (BPHMT-IB)	Kepala UPTD Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak Dan Inseminasi Buatan (Bphmt-Ib)
598	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	UPT Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak Dan Inseminasi Buatan (BPHMT-IB)	Kepala Subbagian Tata Usaha
599	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	UPT Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak Dan Inseminasi Buatan (BPHMT-IB)	Kepala Seksi Hijauan Makanan Ternak
600	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	UPT Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak Dan Inseminasi Buatan (BPHMT-IB)	Seksi Perbibitan Ternak
601	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	UPT Laboratorium Diagnostik, Keswan Dan Kesmavet	Kepala UPT Laboratorium Diagnostik, Keswan Dan Kesmavet
602	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	UPT Laboratorium Diagnostik, Keswan Dan Kesmavet	Kepala Subbagian Tata Usaha

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
603	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	UPT Laboratorium Diagnostik, Keswan Dan Kesmavet	Kepala Seksi Kesehatan Hewan
604	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	UPT Laboratorium Diagnostik, Keswan Dan Kesmavet	Kepala Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
605	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura (BTPPH)	Kepala UPT
606	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura ((BTPPH)	Kepala Subbagian Tata Usaha
607	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura ((BTPPH)	Kepala Seksi Pengamatan Pengendalian OPT Dan DPI
608	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura ((BTPPH)	Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Dan Lab OPT
609	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	UPT Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura ((BTPPH)	Kepala UPT
610	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	UPT Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura ((BTPPH)	Kepala Subbagian Tata Usaha
611	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	UPT Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura (BTPPH)	Kepala Seksi Produksi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura
612	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	UPT Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura ((BTPPH)	Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana
613	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	UPT Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura (BPSBTPH)	Kepala UPT
614	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Daerah	UPT Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura (BPSBTPH)	Kepala Subbagian Tata Usaha
615	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Kepala Dinas
616	Dinas Tenaga Kerja	Sekretaris	Sekretaris
617	Dinas Tenaga Kerja	Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Kepala Bidang
618	Dinas Tenaga Kerja	Bidang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Kepala Bidang
619	Dinas Tenaga Kerja	Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kepala Bidang
620	Dinas Tenaga Kerja	Sekretaris	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
621	Dinas Tenaga Kerja	Sekretaris	Bendahara
622	Dinas Tenaga Kerja	Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja Perempuan Dan Anak

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
623	Dinas Tenaga Kerja	Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
624	Dinas Tenaga Kerja	Bidang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Kepala Seksi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja
625	Dinas Tenaga Kerja	Bidang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Kepala Seksi Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja
626	Dinas Tenaga Kerja	Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kepala Seksi Pengupahan Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
627	Dinas Tenaga Kerja	Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kepala Seksi Persyaratan Kerja, Kelembagaan Dan Kerja Sama Hubungan Industrial
628	Dinas Tenaga Kerja	UPTD Balai Latihan Kerja Provinsi Sulawesi Barat	Kepala UPTD BLK Provinsi Sulawesi Barat
629	Dinas Tenaga Kerja	UPTD Balai Latihan Kerja Provinsi Sulawesi Barat	Kasubag Tu UPTD BLK Provinsi Sulawesi Barat
630	Dinas Tenaga Kerja	UPTD Balai Latihan Kerja Provinsi Sulawesi Barat	Kasi Penyelenggaraan Dan Pemasaran & Latihan UPTD BLK
631	Dinas Tenaga Kerja	UPTD Balai Latihan Kerja Provinsi Sulawesi Barat	Kasi Program Dan Evaluasi Pada UPTD BLK
632	Dinas Tenaga Kerja	UPTD Pengawasan Wilayah I	Kepala UPTD Pengawasan Wilayah I
633	Dinas Tenaga Kerja	UPTD Pengawasan Wilayah I	Tata Usaha UPTD Pengawasan Wilayah I
634	Dinas Tenaga Kerja	UPTD Pengawasan Wilayah I I	Kepala UPTD Pengawasan Wilayah II
635	Dinas Tenaga Kerja	UPTD Pengawasan Wilayah I I	Tata Usaha UPTD Pengawasan Wilayah II
636	Dinas Transmigrasi	Dinas Transmigrasi	Kepala Dinas
637	Dinas Transmigrasi	Sekretariat	Sekretaris
638	Dinas Transmigrasi	Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Transmigrasi	Kepala Bidang
639	Dinas Transmigrasi	Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kepala Bidang
640	Dinas Transmigrasi	Bidang Pembangunan Permukiman Dan Penempatan Transmigrasi	Kepala Bidang
641	Dinas Transmigrasi	Bidang Fasilitasi Pertanahan Dan Pelatihan Transmigrasi	Kepala Bidang
642	Dinas Transmigrasi	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
643	Dinas Transmigrasi	Sekretariat	Bendahara
644	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Inspektur Daerah
645	Inspektorat Daerah	Sekretariat	Sekretaris
646	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Inspektur Pembantu Wilayah Khusus

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
647	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Inspektur Pembantu Wilayah III
648	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Inspektur Pembantu Wilayah II
649	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Inspektur Pembantu Wilayah I
650	Inspektorat Daerah	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
651	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)
652	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Auditor
653	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Bendahara
654	Sebuku Energi Malaqbi (Perumda)	BUMD	Direktur Utama
655	Sebuku Energi Malaqbi (Perumda)	BUMD	Direktur Operasional
656	Sebuku Energi Malaqbi (Perumda)	BUMD	Dewan Pengawas ASN
657	Sebuku Energi Malaqbi (Perumda)	BUMD	Dewan Pengawas Independe
658	Sebuku Energi Malaqbi (Perumda)	BUMD	Direktur Sumber Daya Manusia (SDM)
659	Sebuku Energi Malaqbi (Perumda)	BUMD	Direktur Keuangan
660	Pt. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda)	BUMD	Direktur Utama
661	Pt. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda)	BUMD	Direktur Operasional
662	Pt. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda)	BUMD	Direktur Keuangan
663	Pt. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda)	BUMD	Dewan Komisaris Independen
664	Pt. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda)	BUMD	Dewan Komisaris Asn
665	Rumah Sakit Umum Daerah	Direksi	Direktur
666	Rumah Sakit Umum Daerah	Bidang Perencanaan Dan Pengembangan	Kepala Bidang
667	Rumah Sakit Umum Daerah	Bidang Keperawatan	Kepala Bidang
668	Rumah Sakit Umum Daerah	Bidang Pelayanan	Kepala Bidang
669	Rumah Sakit Umum Daerah	Bagian Tata Usaha	Kepala Bagian
670	Rumah Sakit Umum Daerah	Bidang Perencanaan Dan Pengembangan	Kepala Sub Bidang Rekam Medik
671	Rumah Sakit Umum Daerah	Bidang Perencanaan Dan Pengembangan	Kepala Sub Bidang Program Evaluasi Dan Litbang
672	Rumah Sakit Umum Daerah	Bidang Perencanaan Dan Pengembangan	Kepala Sub Bidang Pemasaran Dan Informasi
673	Rumah Sakit Umum Daerah	Bidang Pelayanan	Kepala Sub Bidang Pelayanan Medik
674	Rumah Sakit Umum Daerah	Bidang Pelayanan	Kepala Sub Bidang Penunjang Medik

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
675	Rumah Sakit Umum Daerah	Bidang Pelayanan	Kepala Sub Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Mutu Pelayanan
676	Rumah Sakit Umum Daerah	Bidang Keperawatan	Kepala Sub Bidang Bina Diklat Keperawatan
677	Rumah Sakit Umum Daerah	Bidang Keperawatan	Kepala Sub Bidang Asuhan Keperawatan
678	Rumah Sakit Umum Daerah	Bidang Keperawatan	Kepala Sub Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Mutu Keperawatan
679	Rumah Sakit Umum Daerah	Bagian Tata Usaha	Kepala Sub Bagian Umum Dan URT
680	Rumah Sakit Umum Daerah	Bagian Tata Usaha	Kepala Sub Bagian Keuangan
681	Rumah Sakit Umum Daerah	Bagian Tata Usaha	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
682	Rumah Sakit Umum Daerah	Bagian Tata Usaha	Bendahara
683	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Sekretariat	Sekretaris
684	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Bidang Perlindungan Masyarakat	Kepala Bidang
685	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Kepala Bidang
686	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran	Kepala Bidang
687	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Kepala Bidang
688	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Sekretariat	Bendahara
689	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
690	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset
691	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Program Dan Pelaporan
692	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Kepala Satuan
693	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Bidang Perlindungan Masyarakat	Kepala Seksi Pengendalian Dan Pengamanan
694	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Bidang Perlindungan Masyarakat	Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
695	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Kepala Seksi Evaluasi Dan Pengawasan
696	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan
697	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran	Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Operasional
698	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran	Kepala Seksi Koordinasi Dan Kerjasama Antar Wilayah

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
699	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Kepala Seksi Kerja Sama
700	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Kepala Seksi Operasi Dan Pengendalian
701	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah
702	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Bendahara
703	Sekretariat Daerah	Biro Umum	Kepala Biro
704	Sekretariat Daerah	Biro Umum	Kepala Bagian Rumah Tangga Dan Pelayanan Umum
705	Sekretariat Daerah	Biro Umum	Kepala Bagian Administrasi Pimpinan
706	Sekretariat Daerah	Biro Umum	Kepala Bagian Administrasi Keuangan Dan Aset
707	Sekretariat Daerah	Biro Umum	Bendahara
708	Sekretariat Daerah	Biro Umum	Bendahara
709	Sekretariat Daerah	Biro Umum	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian
710	Sekretariat Daerah	Biro Umum	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan Dan Staf Ahli
711	Sekretariat Daerah	Biro Umum	Kepala Subbagian Materi, Komunikasi Pimpinan Dan Protokol
712	Sekretariat Daerah	Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	Kepala Biro
713	Sekretariat Daerah	Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
714	Sekretariat Daerah	Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	Bendahara
715	Sekretariat Daerah	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	Kepala Biro
716	Sekretariat Daerah	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa
717	Sekretariat Daerah	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa
718	Sekretariat Daerah	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	Bendahara
719	Sekretariat Daerah	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	Kepala Sub Bagian Administrasi Dan Strategi Pengadaan Barang Dan Jasa
720	Sekretariat Daerah	Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kepala Biro
721	Sekretariat Daerah	Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kepala Bagian Pemerintahan Umum
722	Sekretariat Daerah	Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bendahara
723	Sekretariat Daerah	Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
724	Sekretariat Daerah	Biro Organisasi	Kepala Biro
725	Sekretariat Daerah	Biro Organisasi	Kepala Bagian Tata Laksana Dan Pelayanan Publik

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
726	Sekretariat Daerah	Biro Organisasi	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja
727	Sekretariat Daerah	Biro Organisasi	Kepala Bagian Kelembagaan Dan Analisa Jabatan
728	Sekretariat Daerah	Biro Organisasi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
729	Sekretariat Daerah	Biro Organisasi	Bendahara
730	Sekretariat Daerah	Biro Hukum	Kepala Biro
731	Sekretariat Daerah	Biro Hukum	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota
732	Sekretariat Daerah	Biro Hukum	Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan HAM
733	Sekretariat Daerah	Biro Hukum	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
734	Sekretariat Daerah	Biro Hukum	Bendahara
735	Sekretariat Daerah	Asisten	Asisten Bidang Pemerintahan
736	Sekretariat Daerah	Asisten	Asisten Bidang Administrasi Umum
737	Sekretariat Daerah	Asisten	Asisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan
738	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
739	Sekretariat DPRD	Bagian Umum Dan Keuangan	Kepala Bagian
740	Sekretariat DPRD	Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan	Kepala Bagian
741	Sekretariat DPRD	Bagian Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan	Kepala Bagian
742	Sekretariat DPRD	Bagian Umum Dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Umum
743	Sekretariat DPRD	Bagian Keuangan	Bendahara
744	Staf Ahli	Staf Ahli	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik
745	Staf Ahli	Staf Ahli	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Aparatur
746	Staf Ahli	Staf Ahli	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan
747	Tim Ahli	Tim Ahli	Tim Ahli Bidang Antar Lembaga
748	Tim Ahli	Tim Ahli	Tim Ahli Bidang Keagamaan
749	Tim Ahli	Tim Ahli	Tim Ahli Bidang Ekonomi
750	Tim Ahli	Tim Ahli	Tim Ahli Bidang Penerjemah
751	Tim Ahli	Tim Ahli	Tim Ahli Bidang Hubungan Ke Mahasiswa
752	Tim Ahli	Tim Ahli	Tim Ahli Bidang Informasi Dan Teknologi

NO	INSTANSI	UNIT KERJA	JABATAN
753	Tim Ahli	Tim Ahli	Tim Ahli Bidang Sosial Dan Kemasyarakatan
754	Tim Ahli	Tim Ahli	Tim Ahli Bidang Hubungan Antar Bidang Partai Politik
755	Tim Ahli	Tim Ahli	Tim Ahli Bidang Urusan Kepemudaan
756	Tim Ahli	Tim Ahli	Tim Ahli Bidang Manajemen, Birokrasi Dan Manejemn Publik
757	Tim Ahli	Tim Ahli	Tim Ahli Bidang Pendidikan Informasi Dan Teknologi
758	Tim Ahli	Tim Ahli	Tim Ahli Bidang Pemerintahan
759	Tim Ahli	Tim Ahli	Tim Ahli Bidang Ekonomi
760	Tim Ahli	Tim Ahli	Tim Ahli Bidang Hukum Tata Pemerintahan
761	Sekretaris Pribadi	Sekretaris Pribadi	Sekretris Pribadi Gubernur
762	Sekretaris Pribadi	Sekretaris Pribadi	Sekretris Pribadi Wakil Gubernur
763	Ajudan	Ajudan	Ajudan Gubernur
764	Ajudan	Ajudan	Ajudan Wakil Gubernur

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,



SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003